

# PERAN TIM PENDAMPING KELUARGA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

Ahmad Ali Zanki

NPP. 32.1014

*Asdaf Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara*

*Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email: zanki290803@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Florianus Aser, M. Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** *The role of the Family Assistance Team in the implementation of the Family Hope Program is not optimal in Ternate City, which makes it difficult to achieve the main objectives of PKH. Specifically, this sub-optimality is evidenced by the persistent confusion among 18% of Beneficiary Families (KPM) regarding fund disbursement and child attendance reporting, the significant challenge of reaching 1,120 KPMs in island regions (with routine visits below 50% of target), and coordination difficulties reported by 45% of assistants with related agencies, particularly concerning data updates and KPM commitment verification.* **Purpose:** *This study aims to analyze the role of the Family Assistance Team in the Family Hope Program in Ternate City.* **Method:** *The research method used by researchers in this study is a descriptive qualitative research method. The data collection techniques used are interviews and documentation. Meanwhile, data analysis techniques are carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions.* **Result:** *The results of the study obtained by researchers indicate that the role of the Family Assistance Team includes social assistance, facilitating access to services, verifying commitments, organizing family development sessions (FDS), as well as updating data and handling complaints.* **Conclusion:** *The role of the Family Assistance Team in the implementation of the Family Hope Program has been carried out well, but still requires improvement in terms of the quality of assistance, increasing the number of assistants, increasing capacity, and support from the local government so that the implementation of the program can run more effectively and evenly.*

**Keywords:** *Family Assistance Team, Family Hope Program, Social Assistance.*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** *Peran Tim Pendamping Keluarga dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang belum optimal di Kota Ternate yang*

menyebabkan pencapaian tujuan utama PKH sulit tercapai. Secara spesifik, suboptimalitas ini ditunjukkan oleh masih adanya kebingungan pada 18% Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkait pencairan dana dan pelaporan kehadiran anak, tantangan signifikan dalam menjangkau 1.120 KPM di wilayah kepulauan (dengan kunjungan rutin di bawah 50% dari target), serta kesulitan koordinasi yang dilaporkan oleh 45% pendamping dengan instansi terkait, terutama dalam pemutakhiran data dan verifikasi komitmen KPM. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Tim Pendamping Keluarga dalam Program Keluarga Harapan di Kota Ternate. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa bahwa peran Tim Pendamping Keluarga mencakup pendampingan sosial, fasilitasi akses layanan, verifikasi komitmen, penyelenggaraan sesi pengembangan keluarga (FDS), serta pemutakhiran data dan penanganan pengaduan. **Kesimpulan:** Peran Tim Pendamping Keluarga dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan telah terlaksana dengan baik, namun masih memerlukan perbaikan dari segi kualitas pendampingan, penambahan jumlah pendamping, peningkatan kapasitas, serta dukungan dari pemerintah daerah agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan merata. **Kata Kunci:** Tim Pendamping Keluarga, Program Keluarga Harapan, Pendampingan Sosial.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial bersyarat, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui akses terhadap layanan Kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Kanuna et al., 2022). Meskipun PKH sudah didukung kerangka hukum yang kuat, efektifitas program ini dalam mencapai tujuannya masih menjadi pertanyaan. Berbagai penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan realitas implementasi program. Peran pendamping PKH sudah terlaksana dengan baik dalam menjalankan tugas umum, serta menyelesaikan konflik sosial terkait bantuan sosial melalui proses mediasi dan koordinasi agar penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran (Nandini et al., 2022). Tim pendamping memegang peran penting dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia, sebagai bentuk program bantuan tunai bersyarat (Conditional Cash Transfer/CCT), sejalan dengan inisiatif global yang telah terbukti efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Studi-studi internasional, seperti yang dilakukan oleh Gertler, Martinez, dan Rubio-Codina (2012) terhadap program Progresa di Meksiko, secara konsisten menunjukkan bahwa CCT memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi rumah tangga miskin, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup jangka panjang.

PKH sangat bergantung pada peran vital Tim Pendamping Keluarga sebagai ujung tombak program di lapangan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menetapkan bahwa Tim Pendamping Keluarga memiliki tugas pokok yang mencakup pendampingan sosial, fasilitasi akses layanan, verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyelenggaraan Family Development Session (FDS), pemutakhiran data, dan penanganan pengaduan.

Meskipun memiliki kerangka regulasi yang jelas, efektivitas PKH dalam mencapai tujuannya masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan erat dengan kinerja dan kapasitas Tim Pendamping Keluarga. Rasio pendamping terhadap KPM masih jauh dari ideal. Data Kementerian Sosial tahun 2023 menunjukkan bahwa satu pendamping rata-rata harus menangani 250-300 KPM, jauh melebihi standar ideal 150-200 KPM per pendamping. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap kualitas dan intensitas pendampingan yang diberikan.

Tim Pendamping Keluarga ada untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, tim ini berfungsi memberikan edukasi, dukungan sosial, dan membantu akses layanan publik yang diperlukan. Berdasarkan regulasi yang ada, seperti Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2019 tentang Pembangunan Keluarga, pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat institusi keluarga sebagai pilar utama dalam pembangunan sosial. Berbagai peran dan keterampilan yang dibutuhkan oleh tim pendamping PKH dalam interaksi mereka dengan penerima manfaat program. Peran pemerintah meliputi peran dan keterampilan fasilitatif, di mana tim pendamping PKH bertindak sebagai motivator dan memberikan dukungan dalam layanan kesehatan seperti pemeriksaan rutin untuk ibu hamil dan anak-anak di pusat-pusat kesehatan setempat. Tim pendamping PKH juga memerlukan peran dan keterampilan pendidikan untuk mengkomunikasikan informasi secara efektif dan melakukan kegiatan dengan masyarakat. Peran pendidikan ini penting untuk meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran di antara penerima manfaat program. Selain itu, tim pendamping PKH memerlukan peran dan keterampilan yang representatif untuk menyampaikan informasi dan umpan balik secara efektif antara penerima manfaat dan otoritas pemerintah daerah. Peran ini memastikan bahwa suara dan perhatian penerima manfaat didengar dan ditangani oleh pemangku kepentingan terkait (Marantek & Sejati, 2023).

Keberhasilan program bantuan sosial bersyarat sangat bergantung pada mekanisme implementasi di lapangan, di mana peran pendamping menjadi krusial. Seperti yang disoroti oleh Adato dan Hoddinott (2007) dalam tinjauan mereka tentang program CCT di Amerika Latin, pendamping berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan pusat dan realitas penerima manfaat, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan program dan memfasilitasi akses layanan. Peran ini mencakup edukasi, monitoring, dan mediasi, yang secara langsung mempengaruhi efektivitas penyaluran bantuan dan pencapaian tujuan program.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial bersyarat. Program Keluarga Harapan, sebuah inisiatif bantuan keuangan yang disponsori pemerintah yang bertujuan untuk membantu individu miskin, memberikan kontribusi yang

signifikan untuk meningkatkan kepuasan hidup dan kesejahteraan psikologis di antara penduduk Indonesia. Pada saat yang sama, program ini terbukti mengurangi kecemasan ekonomi dengan memberikan keamanan finansial kepada mereka yang membutuhkan (Tampubolon, 2023). Di Kota Ternate, implementasi PKH dimulai pada tahun 2013 dan telah menjangkau 3.245 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2022 (Dinas Sosial Kota Ternate, 2023). Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin di kota ini.

Koordinasi antar lembaga juga menjadi isu krusial dalam implementasi PKH di Kota Ternate. Survei yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Ternate tahun 2023 mengungkapkan bahwa 45% pendamping melaporkan kesulitan dalam berkoordinasi dengan instansi terkait, terutama dalam hal pemutakhiran data dan verifikasi komitmen KPM.

Kota Ternate, dengan karakteristik geografis dan sosio-kulturalnya yang unik, menghadirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan PKH. Kondisi ini menjadikan peran pendamping keluarga semakin vital, karena mereka harus mampu mengadaptasikan program nasional dengan konteks lokal. Pendamping berperan sebagai tim pendamping, edukator, dan motivator dalam mendukung KPM mencapai kemandirian (Huda & Siswanto, 2024). Sedangkan dalam penelitian Putri Purwanti menyatakan bahwa peran pendamping PKH dalam pemberdayaan masyarakat miskin ada empat peran yaitu peran sebagai tim pendamping, peran sebagai pendidik, peran sebagai penghubung, dan peran teknik (Purwanti, 2022). Kinerja pendamping yang baik dapat menjembatani kesenjangan antara kebijakan pusat dan realitas di lapangan, serta memastikan bahwa manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat Kota Ternate.

Dalam pelaksanaan PKH, peran pendamping keluarga sangat krusial. Pendamping keluarga berfungsi sebagai ujung tombak program, berinteraksi langsung dengan keluarga penerima manfaat (KPM), dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai. Dengan demikian kinerja pendamping keluarga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Ternate. Berdasarkan penelitian (Takaredas et al., 2021) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan peran Tim Pendamping PKH masih menghadapi hambatan meliputi persepsi negatif dari masyarakat terkait pelaksanaan tugas Tim Pendamping PKH dan kurangnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang tugas Tim Pendamping PKH. Namun, sejauh ini, belum ada studi komprehensif yang menganalisis secara spesifik bagaimana peran pendamping keluarga mempengaruhi efektivitas PKH di Kota Ternate. Padahal, pemahaman mendalam tentang hal ini sangat penting untuk evaluasi dan perbaikan program ke depannya.

Selain penyaluran bantuan, peran edukatif pendamping dalam program PKH sangat vital untuk mendorong perubahan perilaku sosial di kalangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Fiszbein dan Schady (2009) menjelaskan bahwa program CCT tidak hanya mengurangi kemiskinan saat ini tetapi juga kemiskinan di masa depan dengan mendorong investasi dalam modal manusia, seperti pendidikan dan kesehatan. Peran pendamping dalam sesi pengembangan keluarga (FDS) dan edukasi langsung menjadi instrumen utama untuk memastikan KPM memahami dan memenuhi komitmen ini, sehingga terjadi peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan anak dan pemanfaatan layanan kesehatan.

Kualitas pendampingan dalam program sosial seperti PKH sangat ditentukan oleh kapasitas dan kompetensi individu pendamping. Hanlon, Barrientos, dan Hulme (2010) dalam analisis mereka tentang revolusi pembangunan dari Global Selatan, menggarisbawahi bahwa investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi staf lapangan adalah kunci untuk memastikan bahwa program tidak hanya menjangkau penerima manfaat, tetapi juga memberikan dampak yang transformatif. Hal ini mencakup keterampilan komunikasi, pemahaman program, dan kemampuan adaptasi terhadap konteks lokal.

Pemahaman mendalam tentang dinamika kependudukan menjadi fondasi penting dalam perancangan dan implementasi program sosial yang efektif. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur dasar ilmu kependudukan (Hutasoit, 2017), pertumbuhan, struktur, dan distribusi penduduk memiliki implikasi langsung terhadap kebutuhan sosial dan keberhasilan intervensi kebijakan, termasuk dalam konteks Program Keluarga Harapan. Tantangan geografis dan demografis di wilayah kepulauan Kota Ternate dalam pelaksanaan PKH memiliki kemiripan dengan dinamika pertumbuhan populasi di daerah perbatasan dan terluar lainnya di Indonesia. Studi kasus di Kota Batam menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi yang tinggi, terutama akibat migrasi masuk, dapat menimbulkan berbagai masalah kependudukan seperti kepadatan penduduk, masalah administrasi, hingga potensi konflik sosial (Hutasoit, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa pendamping PKH di wilayah dengan karakteristik serupa perlu memiliki strategi adaptif untuk mengatasi kompleksitas demografis dan sosial.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Ternate menghadapi berbagai masalah, mulai dari efektivitas peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam menjalankan tugas pendampingan sosial, fasilitasi akses layanan, dan monitoring Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hingga tantangan geografis wilayah kepulauan yang sulit dijangkau. Keterbatasan sumber daya, seperti rasio TPK yang terlalu tinggi terhadap jumlah KPM dan kurangnya pelatihan komprehensif, turut memengaruhi kualitas pendampingan. Selain itu, koordinasi yang kurang optimal antara Dinas Sosial, TPK, dan instansi terkait juga menjadi kendala dalam mendukung KPM memenuhi kewajiban program. Masalah ini berdampak pada pencapaian tujuan utama PKH, termasuk peningkatan kesejahteraan KPM, menurunkan angka kemiskinan di Kota Ternate.

Peran Tim Pendamping Keluarga dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang belum optimal di Kota Ternate yang menyebabkan pencapaian tujuan utama PKH sulit tercapai. Secara spesifik, suboptimalitas ini ditunjukkan oleh masih adanya kebingungan pada 18% Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkait pencairan dana dan pelaporan kehadiran anak, tantangan signifikan dalam menjangkau 1.120 KPM di wilayah kepulauan (dengan kunjungan rutin di bawah 50% dari target), serta kesulitan koordinasi yang dilaporkan oleh 45% pendamping dengan instansi terkait, terutama dalam pemutakhiran data dan verifikasi komitmen KPM. Hal ini menyebabkan pencapaian tujuan utama PKH sulit tercapai.

Implementasi program bantuan sosial di wilayah dengan karakteristik geografis yang menantang, seperti daerah kepulauan di Kota Ternate, seringkali menghadapi hambatan logistik dan operasional yang signifikan. Tantangan ini sejalan dengan observasi Ravallion (2009) yang menekankan bahwa 'menjangkau

kaum miskin' bukan hanya masalah identifikasi, tetapi juga melibatkan kompleksitas dalam penyaluran bantuan dan pemantauan di area yang sulit diakses, yang dapat mempengaruhi kualitas dan intensitas pendampingan

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu tentang peran Tim Pendamping Keluarga dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Penelitian Farah Maulida Amalia berjudul Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Pondok Benda Kota Tangerang Selatan (Amalia, 2022), menemukan bahwa peran pendamping sosial di Tangerang Selatan berjalan cukup baik dan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, serta kesehatan keluarga penerima manfaat. Peran pendamping sosial dalam meningkatkan kesejahteraan KPM dibagi menjadi beberapa peran utama: fasilitatif, edukasional, perwakilan, dan teknis. Penelitian Siska Wati Tolana dkk berjudul Sistem Informasi Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode KMeans Clustering Di Kabupaten Bone Bolango (Tolana et al., 2024), menemukan bahwa sistem informasi pemetaan program keluarga harapan menggunakan *KMeans Clustering* telah berhasil dibuat untuk dapat membantu pihak Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango dalam menghasilkan keputusan yang lebih efektif terhadap bantuan penerima PKH yang lebih baik dan tepat sasaran. Penelitian Maulida Eka Putri Sompie dkk berjudul Analisis Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungai Serut (Sompie, 2022), menemukan bahwa peran pendamping sosial meliputi edukasi, fasilitasi, dan advokasi untuk memastikan KPM memahami dan memenuhi kewajiban mereka dalam program. Ditemukan bahwa peran edukasional masih memerlukan penguatan.

Penelitian Miftahul jannah dan Isnaini Rodiyah berjudul Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) (Implementation of Family Hope Program) (jannah, M., & Rodiyah, 2023), menemukan bahwa meskipun struktur organisasi dan interpretasi kebijakan selaras dengan pedoman pemerintah pusat, terdapat keterbatasan dalam penerapan program. Kekurangan utama meliputi alokasi sumber daya manusia yang tidak memadai untuk pemantauan peserta, kurangnya akses ke fasilitas yang diperlukan, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Penelitian Nefa Wahyuning Anggraini, Alfiatul Khairiyah, dan Fitriatul Hasanah berjudul rogram Keluarga Harapan (PKH): *Examining the Social Relation Approach on Poverty Alleviation Policies in Indonesia* (Anggraini et al., 2024), menemukan bahwa posisi perempuan masih rentan, lemah, dan terdomestikasi yang melekat pada keluarga miskin. Sebagai penerima manfaat utama, kontrol perempuan terhadap sumber daya, akses, dan manfaat yang diperoleh dari layanan PKH juga minim. Hal ini turut menghambat tercapainya tujuan SDGs, yaitu penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Penelitian Adrianus Kabubu Hudang, Tri Hariyanto, dan Rossanto Dwi Handoyo berjudul *Does Conditional Cash Transfer Deliver? The Indonesian Evidence On PKH* (Apakah Transfer Tunai Bersyarat Berhasil? Bukti Di Indonesia Mengenai PKH) (Hudang et al., 2024), menemukan bahwa pemerintah memantau dan memastikan penerima manfaat program mendapatkan manfaatnya. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran penerima manfaat terhadap program dan memastikan ketersediaan

infrastruktur pendukung yang merata sehingga rumah tangga dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan secara optimal.

Penelitian Muhammad Ardhan Arwin, I Nyoman Sumaryadi, dan Rossy Lambelanova berjudul *Evaluasi Kinerja Tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara* (Arwin et al., 2019), menunjukkan bahwa kinerja Tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan sudah baik. Hal ini terlihat dari tingkat Produktivitas, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas tenaga pendamping di dalam melakukan pendataan, verifikasi serta penyaluran bantuan sudah baik. Penelitian Riani Bakri, Bernard Sagrim, Andi Sutra Rimba, dan Murtir Jeddawi berjudul *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bone* (Bakri & , Bernard Sagrim , Andi Sutra Rimba, 2020), menemukan bahwa Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bone berjalan cukup lancar karena proses implementasi PKH yang meliputi penyusunan rencana sudah baik sehingga tercapainya tujuan PKH. Pada pelaksanaan kegiatan dalam penetapan sasaran masih adanya campur tangan pihak lain dalam pendataan penerima KPM walaupun begitu pelaporan sudah berjalan dengan baik. Terdapat beragam faktor yang berperan baik faktor pendukung dan faktor penghambat. Adanya perbaikan secara komprehensif seperti pertemuan rutin antara pendamping dan aparat dinas sosial, penyadaran bagi keluarga penerima manfaat, serta menetapkan besaran biaya operasional bagi pada pendamping PKH. Penelitian Hendi Margio dan A. Rahman berjudul *Penyelenggaraan Pemerintahan Humanistik Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Dinas Sosial Kabupaten Melawi* (Margio & Rahman, 2023), menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Humanistik dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Melawi sudah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi masih ditemui kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan seperti kurangnya kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam membangun hubungan yang humanis dan pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga mempengaruhi pola pikir mereka yang masih sangat pasif. Penelitian Arlina, Muhammad Guntur, dan Umar Nain berjudul *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Lilirawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone (Studi Kasus : PKH Bidang Pendidikan)* (Arlina et al., 2021), menemukan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan keluarga di Desa Lilirawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone khususnya pada bidang pendidikan kurang terimplementasi dengan baik. Hal ini dikarenakan dari keempat indikator keberhasilan implementasi kebijakan oleh Cheema dan Rondinelli hanya satu indikator yang berjalan dengan baik. Selain itu, faktor pendukung salahsatunya adalah bantuan yang diberikan tepat waktu dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan PKH.

Keberhasilan program sosial yang kompleks seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antarlembaga dan pendekatan collaborative governance. Studi kasus pencegahan stunting di Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, merupakan kunci untuk mencapai tujuan program yang komprehensif (Mayangsari, Polyando, & Hutasoit, 2024). Hal ini menggarisbawahi pentingnya sinergi dan kerja sama lintas sektor dalam mengatasi tantangan implementasi PKH di Kota Ternate. Implementasi

kebijakan di tingkat lokal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti kesehatan, seringkali menghadapi tantangan unik yang memerlukan adaptasi. Studi tentang implementasi kebijakan standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Puskesmas Garawangi, Kabupaten Kuningan, menyoroti pentingnya pemahaman konteks lokal dan kapasitas pelaksana dalam memastikan kebijakan dapat berjalan efektif (Rifa'i, Madjid, & Ismunarta, 2016). Dalam konteks PKH, hal ini berarti peran Tim Pendamping Keluarga tidak hanya sebatas penyaluran bantuan, tetapi juga memastikan KPM dapat mengakses dan memanfaatkan layanan kesehatan dan pendidikan sesuai standar yang ditetapkan.

Penelitian tentang peran pendampingan dalam program sosial pemerintah memiliki keterkaitan erat dengan konsep investasi sumber daya manusia dan pembangunan daerah. Giroth et al. (2023) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa "dalam menghadapi era digitalisasi, diperlukan sumber daya manusia untuk investasi dan pembangunan daerah yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya di pemerintah daerah dengan memuat aspek penggunaan teknologi sebagai salah satu pengembangan kompetensi" (Giroth et al., 2023, hlm. 435). Orientasi ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dan sistemik dalam menjaga kualitas hasil pengembangan sumber daya manusia di daerah. Dalam konteks program sosial seperti PKH, aspek kependudukan dan ketenagakerjaan menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas program. Sebagaimana dikemukakan oleh Gatningsih dan Sutrisno (2017) bahwa "perencanaan dan arah kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia memerlukan pemahaman mendalam tentang struktur penduduk, kondisi sosial kependudukan, serta permasalahan ketenagakerjaan yang kompleks" (Gatningsih & Sutrisno, 2017, hlm. 89). Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan komprehensif dalam merancang program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan berbagai aspek sosial ekonomi.

Keberhasilan program sosial seperti PKH tidak lepas dari peran organisasi masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Rahman et al. (2023) dalam penelitiannya menekankan bahwa "Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki potensi besar dalam memobilisasi masyarakat, mengadvokasi kebijakan yang lebih baik, dan memberikan layanan yang diperlukan bagi warga masyarakat" (Rahman et al., 2023, hlm. 1465). Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa strategi pemberdayaan yang dapat digunakan untuk memperkuat peran organisasi masyarakat, antara lain meningkatkan kapasitas organisasi, mempromosikan kemitraan dengan sektor swasta, dan memperkuat jejaring antar-organisasi. Temuan ini sangat relevan dengan peran Tim Pendamping Keluarga yang memerlukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk mencapai efektivitas program. Efektivitas Tim Pendamping Keluarga dalam program PKH juga tidak terlepas dari penerapan manajemen sumber daya manusia yang strategis. Mulianingsih (2019) menjelaskan bahwa "strategi SDM memungkinkan organisasi untuk memahami nilai pelanggan internal dan eksternal, pengetahuan tentang pesaing, produk, teknologi, dan sumber keunggulan kompetitif, sehingga organisasi dapat merespons dengan cepat dan fleksibel terhadap lingkungan yang berubah" (Mulianingsih, 2019, hlm. 1916). Penelitian ini menyoroti pentingnya kelincahan organisasi dan efektivitas sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kemampuan bersaing. Dalam konteks PKH, hal ini menunjukkan bahwa Tim

Pendamping Keluarga memerlukan strategi SDM yang adaptif untuk menghadapi tantangan dinamis dalam pelaksanaan program, terutama di daerah kepulauan seperti Kota Ternate.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan membahas Peran Tim Pendamping Keluarga dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Perbedaan berikutnya terletak pada pengukuran/indikator yang digunakan berbeda dari penelitian sebelumnya yakni, menggunakan pendapat dari Biddle dan Thomas (Sarwono, 2016) yang menyatakan bahwa peran dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu expectation (harapan), norm (norma), performance (wujud perilaku), evaluation (penilaian) dan sanction (sanksi). Selain itu, lokasi penelitian yang dipilih juga berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu di Kota Ternate.

#### **1.5. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Bagaimana Peran Tim Pendamping Keluarga Dalam Program Keluarga Harapan di Kota Ternate.

## **II. METODE**

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yakni cara untuk menjelajahi dan memahami makna dari perilaku individu dan kelompok, serta untuk menggambarkan masalah sosial atau kemanusiaan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dan analisis data dilakukan secara induktif/kualitatif, serta hasil penelitian lebih berorientasi pada makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian (Danim, 2002). Dan dari hasil yang diperoleh dapat terbentuk sebuah kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang ada yaitu tentang peran tim pendamping keluarga dalam Program Keluarga Harapan di Kota Ternate.

Peneliti mengumpulkan data secara triangulasi data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Simangunsong, 2017). Teknik-teknik ini merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diamati. Dengan demikian, data yang didapatkan bersifat valid (menggambarkan kebenaran), reliabel (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, informan dipilih menggunakan metode *purposive sampling* untuk mendapatkan sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu bahwa individu tersebut memiliki informasi yang relevan dan dapat membantu memahami masalah yang sedang diteliti (Sugiyono, 2022). peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, pekerja sosial ahli muda, Tim Pendamping Keluarga, dan dua orang anggota Keluarga Penerima Manfaat. Informan-informan diatas dipilih berdasarkan pengalaman dan pengetahuan terkait penelitian yang dilakukan yaitu dari Dinas Sosial tentang peran Tim Pendamping Keluarga Dalam Program Keluarga Harapan di Kota Ternate.

Adapun analisisnya menggunakan teori peran oleh Biddle dan Thomas (Sarwono, 2016) yang menyatakan bahwa peran dapat diukur melalui empat indikator, yaitu *expectation* (harapan), *norm* (norma), *performance* (wujud perilaku), dan *evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi). Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 di dua lokasi penelitian, yakni Dinas Sosial Kota Ternate dan rumah keluarga penerima manfaat selama 21 hari dari tanggal 6 sampai dengan 25 Januari 2025.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis peran Tim Pendamping Keluarga dalam Program Keluarga Harapan menggunakan teori peran menurut menggunakan teori peran oleh Biddle dan Thomas (Sarwono, 2016) yang menyatakan bahwa peran dapat diukur melalui empat indikator, yaitu *expectation* (harapan), *norm* (norma), *performance* (wujud perilaku), dan *evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### 3.1. *Expectation* (Harapan)

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Ternate, Tim Pendamping Keluarga (TPK) memiliki posisi strategis sebagai aktor lapangan yang menjembatani kebijakan pusat dengan kondisi nyata masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Biddle (1986), harapan sosial terhadap suatu peran merupakan dimensi fundamental yang menentukan bagaimana individu memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam suatu struktur sosial.

Target yang ditetapkan bagi tim pendamping keluarga (TPK) dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Ternate menggambarkan ekspektasi dari pihak-pihak terkait, seperti Dinas Sosial dan Koordinator PKH, terhadap capaian-capaian yang harus diraih oleh para pendamping. Salah satu target utama yang ditetapkan adalah kemampuan tim pendamping keluarga dalam menyampaikan informasi PKH secara utuh dan akurat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Terwujudnya pemahaman yang menyeluruh dari KPM terhadap seluruh aspek program, termasuk hak, kewajiban, serta prosedur pelaksanaan bantuan sosial. Target ini menempatkan pendamping sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, di mana keberhasilan peran mereka diukur dari tingkat pemahaman KPM terhadap program. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Ternate tahun 2024, masih terdapat sekitar 18% KPM yang mengalami kebingungan dalam proses pencairan bantuan atau pelaporan kehadiran anak di sekolah, menunjukkan bahwa target keterpenuhan informasi masih perlu ditingkatkan. Target lainnya adalah peran pendamping dalam mendorong perubahan perilaku sosial masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Target ini menunjukkan bahwa peran TPK tidak hanya bersifat administratif, melainkan strategis—sebagai agen perubahan (*agent of change*). Pendamping diharapkan dapat menargetkan peningkatan kesadaran KPM terhadap pentingnya menyekolahkan anak secara rutin dan memanfaatkan layanan kesehatan seperti posyandu, imunisasi, dan pemeriksaan ibu hamil.

**Tabel 3. 1**  
**Data Keluarga Penerima Manfaat di Kota Ternate**

<b>NO</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>KPM Himbara BRI</b>	<b>KPM Kantor Pos</b>	<b>Total</b>
1	Ternate Pulu	264	168	<b>432</b>
2	Ternate Barat	278	310	<b>588</b>
3	Ternate Selatan	350	249	<b>599</b>
4	Ternate Tengah	525	142	<b>667</b>
5	Ternate Utara	414	49	<b>463</b>
6	Pulau Hiri	279	-	<b>279</b>
7	Pulau Moti	246	152	<b>398</b>
8	Pulau Batang Dua	329	-	<b>329</b>
<b>Kota Ternate</b>		<b>2685</b>	<b>1070</b>	<b>3755</b>

Sumber : Dinas Sosial Kota Ternate, 2024

Data dari Dinas Sosial menunjukkan bahwa dari total 3.755 KPM di Kota Ternate, sekitar 1.120 di antaranya berada di wilayah kepulauan. Namun, laporan semester I tahun 2024 menunjukkan bahwa kunjungan rutin ke daerah tersebut masih di bawah 50% target yang ditetapkan. Artinya, target jangkauan wilayah masih menjadi fokus utama yang perlu dioptimalkan oleh TPK ke depan.

Harapan dari Dinas Sosial Kota Ternate dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Ternate, harapan utama terhadap TPK meliputi: Transmisi Informasi Program: TPK diharapkan mampu menyampaikan informasi PKH secara utuh dan akurat kepada KPM, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terkait hak dan kewajiban. Monitoring Kelayakan KPM: TPK bertugas untuk memantau secara rutin kondisi sosial-ekonomi KPM guna memastikan bahwa mereka masih memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Pemberdayaan KPM: Selain fungsi administratif, Dinas mengharapkan TPK berperan aktif dalam meningkatkan kemandirian KPM melalui edukasi sosial.

Harapan dari Koordinator Kota Ternate dalam wawancara yaitu: Komitmen terhadap target kerja: TPK harus memenuhi target kunjungan rumah minimal dua kali per bulan per KPM. Kepatuhan administratif: Laporan kunjungan dan pelaksanaan tugas harus tepat waktu dan sesuai format yang ditentukan.

Fleksibilitas dan Responsif: TPK harus cepat merespons perubahan kebijakan atau arahan baru dari pusat. Menurut Koordinator, "Kunci keberhasilan PKH ada di disiplin dan fleksibilitas pendamping di lapangan." Harapan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Hasil wawancara dengan KPM menunjukkan bahwa harapan mereka terhadap TPK meliputi:

Kemudahan akses informasi: KPM berharap TPK dapat memberikan informasi tentang jadwal pencairan dana dan prosedur administrasi. Bantuan Non-Administratif: Banyak KPM menginginkan bantuan dalam mengakses layanan

pendidikan dan kesehatan, bukan hanya dalam hal pencairan dana. Pendekatan Humanis: KPM menginginkan TPK yang ramah, sabar, dan tidak diskriminatif.

Harapan terhadap dampak program mencerminkan sejauh mana aktor yang berperan dalam suatu program memiliki ekspektasi positif terhadap hasil atau perubahan yang akan dicapai melalui pelaksanaan perannya. Dalam konteks peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam Program Keluarga Harapan (PKH), harapan ini mengarah pada dampak yang diinginkan terhadap pemahaman dan sikap masyarakat terhadap program tersebut.

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa peran TPK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan persuasif, yang diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori peran menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2016), yang menjelaskan bahwa peran sosial melibatkan seperangkat harapan yang berkaitan dengan posisi atau fungsi sosial seseorang. Dalam hal ini, TPK diharapkan menjalankan perannya sebagai agen perubahan sosial di tengah masyarakat, yang tidak hanya mendampingi secara teknis tetapi juga menjadi tim pendamping pemahaman program secara substansial. Berdasarkan data lapangan, masih terdapat sejumlah KPM yang belum sepenuhnya memahami tujuan dari PKH, dan hal ini menjadi salah satu tantangan yang ingin diatasi melalui optimalisasi peran TPK. Oleh karena itu, harapan Koordinator PKH terhadap kontribusi TPK menjadi indikator penting yang menunjukkan peran strategis mereka dalam memastikan keberhasilan implementasi PKH di Kota Ternate.

### **3.2. Norm (Norma)**

Bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pelaksanaan PKH di Kota Ternate, norma-norma yang berlaku berasal dari berbagai sumber peraturan pemerintah, pedoman operasional program, nilai sosial masyarakat, dan nilai-nilai internal organisasi (Dinas Sosial dan Koordinator PKH). Norma ini menjadi pedoman yang mengatur tindakan TPK di lapangan.

Berdasarkan dokumen Pedoman Operasional PKH Tahun 2023 dan hasil wawancara dengan Koordinator PKH Kota Ternate, norma formal yang harus diikuti TPK mencakup: Integritas dan Akuntabilitas: TPK wajib menjalankan tugas secara jujur, akurat, dan bertanggung jawab atas setiap laporan dan keputusan yang dibuat. Kerja Sesuai SOP: Semua kegiatan pendampingan harus mengacu pada Standard Operating Procedures (SOP) PKH, termasuk tata cara verifikasi kondisi KPM dan penyusunan laporan. Kerahasiaan Data: Data pribadi KPM harus dijaga kerahasiaannya, dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin.

Dalam wawancara koordinator PKH pada 23 Januari 2025 menegaskan bahwa: "Norma dasar kita adalah jujur, disiplin, dan profesional. Itu sudah harga mati." Pernyataan tersebut merujuk pada seperangkat aturan, pedoman, dan nilai yang menjadi dasar bagi perilaku atau tindakan yang diharapkan dari masing-masing aktor dalam suatu sistem sosial. Dalam konteks pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), norma-norma tersebut menjadi acuan bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan pihak terkait lainnya dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Juga hal ini ditegaskan oleh pernyataan dari Pekerja Sosial Ahli Muda yang menyampaikan pada 23 Januari 2025 bahwa: "Norma-norma yang berlaku berasal dari berbagai sumber peraturan pemerintah, pedoman operasional program, nilai sosial masyarakat, dan nilai-nilai internal organisasi."

Kutipan ini menggambarkan bahwa pelaksanaan tugas TPK tidak lepas dari kerangka normatif yang bersumber dari berbagai level, mulai dari regulasi formal hingga nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat dan organisasi. Data di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kota Ternate dijalankan berdasarkan Pedoman Umum PKH yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial, serta peraturan daerah dan kebijakan teknis dari pemerintah kota. Selain itu, dalam praktiknya, TPK juga mempertimbangkan nilai sosial setempat agar pendekatan yang dilakukan lebih diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan program sangat bergantung pada seberapa baik masing-masing pihak memahami dan menjalankan tupoksi mereka sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Adapun Norma Sosial hasil sebagai observasi lapangan menunjukkan bahwa norma sosial masyarakat di Kota Ternate juga membentuk perilaku TPK, seperti: Sikap sopan dan menghormati adat: Dalam setiap kunjungan, TPK diharapkan menunjukkan penghormatan terhadap adat istiadat lokal, seperti penggunaan bahasa yang santun. Keadilan dalam Pelayanan: TPK diharapkan memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh KPM, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial atau suku.

Meskipun norma-norma tersebut sudah ditetapkan, terdapat beberapa hambatan dalam implementasinya yaitu: Tumpang tindih aturan: Kadang terdapat perbedaan interpretasi antara aturan pusat dan kondisi lapangan. Norma Sosial Bertentangan: Dalam beberapa kasus, norma adat lokal berbenturan dengan norma program, seperti keengganan KPM membuka data pribadi. Norma-norma yang mengatur peran TPK dalam pelaksanaan PKH di Kota Ternate bersifat kompleks, mencakup unsur formal, sosial, dan internal organisasi. Kepatuhan terhadap norma ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas program, serta membentuk citra positif TPK di mata KPM dan masyarakat luas.

### **3.3. *Performance (Wujud Perilaku)***

Indikator Interaksi dan Partisipasi dalam dimensi performance (wujud dan perilaku) menggambarkan sejauh mana peran dijalankan secara nyata melalui tindakan, keterlibatan aktif, dan komunikasi antara pelaku program dengan pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat. Dalam konteks peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Ternate, performa ini terlihat dari interaksi langsung dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pelaporan kegiatan, serta keterlibatan dalam proses evaluasi. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada 22 Januari 2025 dalam wawancara menyatakan bahwa: “Dengan melalui Koordinator PKH melakukan supervisi bulanan untuk memantau kinerja TPK,” dan “Wilayah yang sulit dijangkau, apalagi di kepulauan, juga masalah adat masyarakat lokal.”

Pelaksanaan peran TPK senantiasa dipantau melalui supervisi rutin, namun partisipasi mereka juga dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sosial budaya yang menjadi tantangan tersendiri. Pernyataan tersebut mencerminkan realitas di lapangan bahwa kualitas dan intensitas kerja pendamping bisa berbeda-beda. Sementara itu, dalam wawancara dengan Ibu Ranti pada 23 Januari 2025 menambahkan bahwa: “Beberapa pendamping sangat berdedikasi, tapi ada juga dari mereka juga kurang aktif mungkin masalah pribadi, atau karena jauh dari wilayah KPM-nya.”

Pernyataan tersebut mencerminkan realitas di lapangan bahwa kualitas dan intensitas kerja pendamping bisa berbeda-beda. Beberapa pendamping menunjukkan dedikasi tinggi dengan rutin melakukan kunjungan, memberikan edukasi, serta memastikan bantuan tepat sasaran. Namun, ada juga pendamping yang kurang aktif, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kendala pribadi (misalnya kesehatan, beban keluarga), keterbatasan transportasi, atau jarak tempuh yang jauh antara tempat tinggal pendamping dan lokasi keluarga penerima manfaat (KPM). Hal ini tentu berdampak pada efektivitas pelaksanaan program di lapangan, sehingga perlu adanya dukungan, supervisi, serta evaluasi berkala agar peran pendamping dapat berjalan optimal dan merata. Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam performa TPK, yang berkaitan dengan faktor personal maupun keterbatasan geografis.

Dalam teori peran Biddle dan Thomas yang dikutip dalam Sarwono (2016), performance mencerminkan perwujudan aktual dari peran yang diharapkan. Interaksi langsung dengan KPM, pelaporan kegiatan, serta keterlibatan dalam monitoring dan evaluasi adalah bentuk nyata dari pelaksanaan peran tersebut. Data ini mencerminkan bahwa peran TPK di lapangan cukup aktif, namun tidak merata, dipengaruhi oleh tantangan medan dan faktor internal pendamping itu sendiri. Oleh karena itu, pemantauan berkala dan dukungan terhadap TPK menjadi penting agar interaksi dan partisipasi yang dilakukan benar-benar mendukung keberhasilan implementasi PKH di berbagai wilayah di Kota Ternate, termasuk daerah kepulauan.

Performance TPK menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara umum yaitu: Verifikasi dan validasi data: Sebagai bagian dari tugas utama, TPK wajib melakukan verifikasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara berkala. Sebagian besar TPK mampu menyelesaikan verifikasi dalam tenggat waktu. Namun, terdapat keluhan tentang akurasi data akibat keterbatasan waktu dan medan geografis.

Pemberdayaan KPM: TPK dituntut tidak hanya mencatat data, tetapi juga memberdayakan KPM melalui edukasi tentang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga. Di Kecamatan Ternate Selatan, TPK aktif mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas pentingnya pendidikan anak. Namun, di beberapa daerah terpencil, pemberdayaan hanya berjalan formalitas karena keterbatasan waktu. Performance pemberdayaan TPK beragam, sangat bergantung pada kondisi geografis dan tingkat partisipasi KPM.

Pelaporan dan administrasi: TPK wajib membuat laporan bulanan dan menginput data ke dalam sistem e-PKH. Dari hasil Observasi tingkat ketepatan waktu laporan tinggi (>85% TPK tepat waktu). Namun, keluhan tentang kelebihan beban kerja administratif sering muncul dalam FGD. Performance administrasi berjalan baik, tetapi berisiko menyebabkan kelelahan kerja (burnout) jika tidak diimbangi dengan manajemen beban tugas yang proporsional.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, faktor-faktor berikut sangat mempengaruhi performance TPK yaitu: Kompetensi individu: Kompetensi mencakup pengetahuan tentang PKH, keterampilan komunikasi, dan kemampuan administrasi. TPK dengan latar belakang pendidikan sosial lebih cepat beradaptasi dengan tugas dibandingkan yang berlatar belakang umum. Kompetensi menjadi prediktor kuat terhadap kualitas performance TPK. Motivasi Kerja: Motivasi intrinsik (seperti rasa empati terhadap KPM) dan ekstrinsik (insentif finansial) berpengaruh besar terhadap kinerja. Motivasi tinggi terlihat pada TPK yang merasa pekerjaannya membawa dampak positif langsung pada masyarakat. Sebaliknya, TPK yang mengeluh tentang rendahnya insentif menunjukkan penurunan performance. Dukungan Organisasi: Dukungan berupa pelatihan rutin, supervisi

lapangan, dan bantuan fasilitas sangat meningkatkan performance. TPK di Kota Ternate yang rutin mendapatkan bimbingan teknis menunjukkan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Meskipun performance TPK secara umum baik, terdapat beberapa hambatan utama yaitu: Hambatan geografis: Lokasi KPM yang sulit dijangkau memperlambat kunjungan dan pelaporan. Keterbatasan sarana: Ketiadaan kendaraan operasional dan minimnya alat kerja digital memperlambat kerja TPK. Beban kerja administratif yang tinggi: Meningkatkan risiko stres dan menurunkan produktivitas.

Dalam teori peran Biddle, performance yang optimal tercapai ketika harapan terhadap peran jelas, norma peran dipahami dan diterima, evaluasi performance dilakukan secara adil dan konsisten. Dalam konteks ini, TPK Kota Ternate menunjukkan performance yang baik di tengah tantangan struktural dan kultural. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, perlu dilakukan reformasi struktural terhadap sistem dukungan, insentif, dan supervisi. Jika tidak, maka deviasi peran berupa penurunan kualitas layanan dan ketidakpatuhan terhadap SOP dapat semakin meningkat.

Performance TPK Kota Ternate dalam pelaksanaan PKH dapat dikategorikan cukup baik namun masih membutuhkan penguatan di beberapa aspek penting, terutama dalam hal dukungan organisasi, manajemen beban kerja, dan adaptasi terhadap kondisi geografis. Kinerja yang optimal hanya dapat dicapai apabila ada sinergi antara kompetensi individu, motivasi, norma kerja, serta dukungan organisasi yang berkelanjutan..

#### **3.4. *Evaluation (Penilaian)***

Evaluasi menjadi penting untuk menentukan efektivitas kinerja, memberikan umpan balik untuk perbaikan, dan menjaga konsistensi pelaksanaan program. Dalam konteks ini, evaluasi terhadap Tim Pendamping Keluarga (TPK) mencakup penilaian internal oleh koordinator program dan penilaian eksternal oleh stakeholder (KPM, dinas sosial, dan masyarakat umum).

Hasil program, timbal balik, sanksi, dan apresiasi berkaitan erat dengan dimensi Evaluation dan Sanction dalam teori peran menurut Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2016), yang menekankan bahwa setiap pelaksanaan peran akan dinilai dan diberikan konsekuensi baik berupa penghargaan atau sanksi. Dalam konteks pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Ternate, evaluasi terhadap peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dilakukan secara sistematis dan mencakup berbagai aspek. Dalam wawancara dengan Kepala Dinas Kota Ternate pada 23 Januari 2025 menyatakan bahwa: “Penilaian ini dilihat dari seberapa sering mereka mengunjungi keluarga, akurasi laporan yang dibuat, dan dampak positif yang dirasakan oleh keluarga penerima manfaat.”

Hal ini menunjukkan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan indikator kuantitatif seperti frekuensi kunjungan dan kualitas laporan, serta indikator kualitatif seperti perubahan nyata pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lebih lanjut, wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada 21 Januari 2025 menambahkan bahwa: “Supervisi rutin dan survei kepuasan dari KPM menjadi bagian penting dari proses evaluasi, disertai dengan evaluasi administratif terhadap laporan-laporan yang disusun oleh TPK.”

Dengan demikian, evaluasi tidak hanya bersifat internal melalui supervisi dan dokumentasi, tetapi juga melibatkan suara KPM sebagai pihak yang merasakan

langsung manfaat program. Proses evaluasi ini menjadi landasan dalam memberikan timbal balik atas kinerja TPK, baik dalam bentuk motivasi maupun koreksi. Dalam praktiknya, evaluasi ini menghasilkan respon nyata berupa sistem sanksi dan penghargaan yang diterapkan oleh Dinas Sosial. Dalam wawancara pada tanggal 22 Januari dengan Kepala Dinas Sosial menjelaskan bahwa: “TPK yang kinerja sesuai dengan dan memenuhi target akan mendapatkan bonus kinerja, TPK yang tidak mencapai target bisa mendapatkan peringatan atau teguran.”

Pemberian sanksi berupa teguran bertujuan untuk memperbaiki kinerja dan menjaga disiplin, sedangkan penghargaan dalam bentuk bonus menjadi bentuk apresiasi yang mendorong motivasi dan dedikasi. Hal ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara reward dan punishment yang menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan peran TPK.

Secara keseluruhan, indikator hasil program serta mekanisme evaluasi dan sanksi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran TPK dalam PKH tidak lepas dari proses pemantauan yang berkelanjutan. Evaluasi yang objektif dan partisipatif menjadi alat untuk memastikan bahwa tugas TPK tidak hanya dilaksanakan, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat. Dengan adanya sistem apresiasi dan sanksi, TPK diharapkan dapat mempertahankan integritas, profesionalisme, dan efektivitas dalam menjalankan pendampingan terhadap KPM, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan sosial seperti Kota Ternate.

Mekanisme Evaluasi TPK di Kota Ternate berdasarkan temuan di lapangan, evaluasi performance TPK dilakukan melalui beberapa mekanisme yaitu: Evaluasi internal: Dilaksanakan oleh Koordinator PKH Kota Ternate dan Koordinator Kecamatan. Supervisi rutin bulanan. Penilaian kinerja berbasis target (jumlah validasi, input data, jumlah pertemuan keluarga). Evaluasi administratif atas laporan yang dikumpulkan. TPK yang aktif, disiplin, dan tepat waktu mendapatkan apresiasi. Sebaliknya, TPK yang sering terlambat dalam input data mendapat peringatan. Evaluasi eksternal: Melibatkan umpan balik dari KPM. Mayoritas KPM menyatakan puas terhadap pelayanan TPK, namun beberapa mengeluhkan kurangnya intensitas kunjungan.

Evaluasi Berbasis Capaian Program: Indikator evaluasi berbasis program meliputi: Persentase KPM yang mengalami peningkatan kesejahteraan. Angka kehadiran KPM dalam pertemuan kelompok. Tingkat kelulusan anak-anak KPM dalam pendidikan dasar.

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh beberapa temuan utama yaitu: Banyak TPK bekerja lebih dari target minimal. Kualitas hubungan interpersonal baik, TPK berhasil membangun hubungan kepercayaan dengan KPM. Konsistensi pelaporan tinggi, Tingkat kepatuhan administratif lebih dari 80%. Keterbatasan kunjungan lapangan: TPK di daerah pulau jarang melakukan kunjungan karena faktor transportasi mengakibatkan ketimpangan kapasitas. Ada perbedaan signifikan antara kinerja TPK yang sudah berpengalaman dan yang baru bergabung. Dukungan program nasional: PKH mendapat prioritas di pemerintah pusat sehingga peluang mendapatkan dana pelatihan tambahan terbuka. Potensi kolaborasi lokal: Bekerja sama dengan puskesmas, sekolah, dan LSM lokal dapat memperkuat peran TPK. Kondisi geografis ekstrim: Beberapa daerah sangat sulit dijangkau, menghambat evaluasi rutin. Tugas yang berat tanpa dukungan yang memadai berpotensi menurunkan motivasi kerja TPK.

Evaluasi yang dilakukan berdampak langsung terhadap pengembangan kapasitas TPK: Pelatihan tambahan diselenggarakan bagi TPK yang performanya di bawah standar. Rotasi tugas diberlakukan untuk TPK yang mengalami kejenuhan di wilayah kerja tertentu. Penyesuaian indikator kerja dilakukan untuk memperhitungkan faktor geografis. Evaluasi menjadi instrumen koreksi, adaptasi, dan inovasi dalam pelaksanaan program PKH di Kota Ternate.

Evaluation terhadap peran TPK dalam pelaksanaan PKH di Kota Ternate menunjukkan bahwa meskipun secara umum kinerja TPK cukup baik, masih terdapat ruang untuk perbaikan. Evaluasi yang sistematis, adil, dan berbasis data menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas program PKH di masa mendatang.

Dari hasil secara keseluruhan, TPK memainkan peran strategis dalam mendukung keberhasilan PKH di Kota Ternate. Namun untuk optimalisasi peran tersebut, diperlukan penguatan kapasitas pendamping, peningkatan dukungan infrastruktur, serta pengembangan sistem evaluasi yang lebih adaptif terhadap dinamika lapangan.

Dengan memahami dinamika harapan, norma, kinerja, dan evaluasi berdasarkan teori peran Biddle, diharapkan pelaksanaan PKH di Kota Ternate dapat lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat..

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Peneliti menemukan temuan penting yakni peran Tim Pendamping Keluarga dalam Program Keluarga Harapan di Kota Ternate telah berjalan baik, namun belum optimal dikarenakan masih ditemukan beberapa hambatan meliputi terdapat sejumlah KPM yang belum sepenuhnya memahami tujuan dari PKH, keterbatasan jumlah pendamping, medan geografis yang sulit, serta perbedaan kapasitas individu pendamping, sarana transportasi yang kurang memadai, akses teknologi yang terbatas, serta motivasi kerja yang rendah. Sama halnya dengan temuan penelitian Maulida Eka Putri Sompie dkk (Sompie, 2022) dan Nefa Wahyuning Anggraini, Alfiatul Khairiyah, dan Fitriatul Hasanah (Anggraini et al., 2024) bahwa peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan masih membutuhkan penguatan edukasional kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam mengurangi kemiskinan. Hal yang sama juga ditemukan oleh penelitian Miftahul jannah dan Isnaini Rodiyah bahwa meskipun struktur organisasi dan interpretasi kebijakan selaras dengan pedoman pemerintah pusat, terdapat keterbatasan dalam penerapan program. Kekurangan utama meliputi alokasi sumber daya manusia yang tidak memadai untuk pemantauan peserta, kurangnya akses ke fasilitas yang diperlukan, dan kurangnya kesadaran masyarakat (jannah, M., & Rodiyah, 2023).

Peran Tim Pendamping Keluarga memberikan banyak dampak positif dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Peneliti menemukan bahwa kinerja TPK dalam pelaksanaan tugas dapat dikatakan efektif. Mereka mampu mendampingi Keluarga Penerima Manfaat secara rutin, memberikan edukasi tentang pengasuhan anak, kesehatan, dan pendidikan, serta membantu proses pencairan bantuan sosial. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa peran pendamping sosial di Tangerang Selatan berjalan cukup baik dan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, serta kesehatan keluarga penerima manfaat. Peran pendamping sosial dalam

meningkatkan kesejahteraan KPM dibagi menjadi beberapa peran utama: fasilitatif, edukasional, perwakilan, dan teknis (Amalia, 2022).

Adanya Program Keluarga Harapan ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu mensejahterakan masyarakat dan mengurangi beban ekonomi Keluarga Penerima Manfaat layaknya hasil temuan penelitian Farah Maulida Amalia bahwa peran pendamping sosial di Tangerang Selatan berjalan cukup baik dan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, serta kesehatan keluarga penerima manfaat. Peran pendamping sosial dalam meningkatkan kesejahteraan KPM dibagi menjadi beberapa peran utama: fasilitatif, edukasional, perwakilan, dan teknis (Anggraini et al., 2024).

Evaluasi terhadap peran TPK dilakukan melalui monitoring dan supervisi berkala. Evaluasi ini menunjukkan bahwa secara umum, peran TPK sudah memenuhi standar yang diharapkan, namun masih diperlukan penguatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, pembinaan mental kerja, serta pemberian insentif yang layak untuk menjaga semangat pendamping dalam bekerja. Sama halnya dengan penelitian Adrianus Kabubu Hudang, Tri Hariyanto, dan Rossanto Dwi Handoyo menemukan bahwa pemerintah memantau dan memastikan penerima manfaat program mendapatkan manfaatnya. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran penerima manfaat terhadap program dan memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung yang merata sehingga rumah tangga dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan secara optimal (Hudang et al., 2024).

### **3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Peneliti menemukan bahwa peran Tim Pendamping Keluarga dalam Program Keluarga Harapan di Kota Ternate masih menghadapi beberapa hambatan yakni terdapat sejumlah KPM yang belum sepenuhnya memahami tujuan dari PKH, keterbatasan jumlah pendamping, medan geografis yang sulit, serta perbedaan kapasitas individu pendamping, sarana transportasi yang kurang memadai, akses teknologi yang terbatas, serta motivasi kerja yang rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menemukan solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut sangat penting dalam menunjang peran Tim Pendamping Keluarga dalam Program Keluarga Harapan secara optimal di Kota Ternate. Penelitian Nefa Wahyuning Anggraini, Alfiatul Khairiyah, dan Fitriatul Hasanah juga menemukan hal yang sama yaitu Sebagai penerima manfaat utama, kontrol perempuan terhadap sumber daya, akses, dan manfaat yang diperoleh dari layanan PKH juga minim. Hal ini turut menghambat tercapainya tujuan SDGs, yaitu penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan (Anggraini et al., 2024).

## **IV. KESIMPULAN**

Peneliti menyimpulkan bahwa peran Tim Pendamping Keluarga dalam Program Keluarga Harapan di Kota Ternate telah terlaksana dengan baik, namun masih memerlukan perbaikan dari segi kualitas pendampingan, penambahan jumlah pendamping, peningkatan kapasitas, serta dukungan dari pemerintah daerah agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan merata. Harapan terhadap Tim Pendamping Keluarga sangat besar, baik dari pemerintah daerah, stakeholder PKH, maupun masyarakat penerima manfaat. Norma yang mengatur peran dan

tugas TPK telah tersedia dalam bentuk regulasi, petunjuk teknis, dan pedoman pelaksanaan PKH. Namun, terdapat kendala dalam penerapan norma secara penuh di lapangan akibat keterbatasan jumlah pendamping, medan geografis yang sulit, serta perbedaan kapasitas individu pendamping. Kinerja TPK dalam pelaksanaan tugas dapat dikatakan efektif. Mereka mampu mendampingi Keluarga Penerima Manfaat secara rutin, memberikan edukasi tentang pengasuhan anak, kesehatan, dan pendidikan, serta membantu proses pencairan bantuan sosial. Meski demikian, perbedaan kinerja antar wilayah masih terjadi akibat faktor-faktor seperti sarana transportasi, akses teknologi, serta motivasi kerja. Evaluasi terhadap peran TPK dilakukan melalui monitoring dan supervisi berkala. Evaluasi ini menunjukkan bahwa secara umum, peran TPK sudah memenuhi standar yang diharapkan, namun masih diperlukan penguatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, pembinaan mental kerja, serta pemberian insentif yang layak untuk menjaga semangat pendamping dalam bekerja.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu, adanya keterbatasan informasi dalam meneliti dan keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti selama proses penelitian dilaksanakan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran Tim Pendamping Keluarga dalam Program Keluarga Harapan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Ternate dan jajarannya, dan keluarga penerima manfaat serta seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Fiszbein, A., & Schady, N. (2009). *Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty*. The World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2692>
- Gatiningsih, G., & Sutrisno, E. (2017). *Kependudukan dan Ketenagakerjaan*. IPDN Press. <http://eprints.ipdn.ac.id/2402/1/Buku%20GATI%20dan%20EKO%20Kependudukan%20LENGKAP.pdf>
- Hanlon, J., Barrientos, A., & Hulme, D. (2010). *Just Give Money to the Poor: The Development Revolution from the Global South*. Kumarian Press. [https://books.google.co.id/books/about/Just\\_Give\\_Money\\_to\\_the\\_Poor.html?id=2000AQAIAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Just_Give_Money_to_the_Poor.html?id=2000AQAIAAJ&redir_esc=y)
- Hutasoit, I. (2017). *Pengantar Ilmu Kependudukan*. ISBN: 978-602-289-286-1.
- Ravallion, M. (2009). *Bailing Out the Poor*. World Bank Policy Research Working Paper 4942. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4090>

- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintah*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif)*. Alfabeta.

### **Jurnal Nasional**

- Amalia, F. M. (2022). Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Pondok Benda Kota Tangerang Selatan. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62046>
- Arlina, G., Muhammad, G., & Nain, U. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Lilirawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone (Studi Kasus: PKH Bidang Pendidikan). *Jurnal Ilmu Sosiologi Dialektika Kontemporer*, 9(2), 70–80. <http://eprints2.ipdn.ac.id/611/1/31655-76278-3-PB.pdf>
- Arwin, M. A., Sumaryadi, I. N., & Lambelanova, R. (2019). Evaluasi Kinerja Tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. *Visioner*, 11(3), 323–335. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/698/1/EVALUASI%20KINERJA%20TENAGA%20PENDAMPING%20PROGRAM%20KELUARGA%20HARAPAN%20DI%20KECAMATAN%20KATOBU%20KABUPATEN%20MUNA%20PROVINSI%20SULAWESI%20TENGGAARA.pdf>
- Bakri, R., Sagrim, B., Rimba, A. S., & Jeddawi, M. (2020). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bone. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 139–148. <https://doi.org/10.61076/jpp.v2i2.1530>
- Huda, M. M., & Siswanto, E. (2024). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Fasilitator Di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(3), 133–143. <http://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/2508%0Ahttps://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/download/2508/2359>
- Giroth, L. G. J., Pusung, P. H., Tendean, N. R. P., & Sumual, T. E. M. (2023). Human Capital Investment and Local Development in Digitalization Era. *KnE Social Sciences*, 430–446. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i5.13015>
- Jannah, M., & Rodiyah, I. (2023). Implementation of Family Hope Program (PKH): Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH). *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(1). <https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1349>
- Kanuna, R. S., Nawawi, J., & Nulinah. (2022). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 58–68. <https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.7>
- Margio, H., & Rahman, A. (2023). Penyelenggaraan Pemerintahan

Humanistik Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Dinas Sosial Kabupaten Melawi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, X(Y), ZZ-AA.

[http://eprints.ipdn.ac.id/13749/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/13749/1/Hendi%20Margio\\_30.0886\\_H4\\_%20Penyelenggaraan%20Pemerintahan%20Humanistik%20Dalam%20Penyaluran%20Program%20Keluarga%20Harapan%20%28PKH%29%20Di%20Dinas%20Sosial%20Kabupaten%20Melawi%20Provinsi%20Kalimantan%20Barat.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/13749/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/13749/1/Hendi%20Margio_30.0886_H4_%20Penyelenggaraan%20Pemerintahan%20Humanistik%20Dalam%20Penyaluran%20Program%20Keluarga%20Harapan%20%28PKH%29%20Di%20Dinas%20Sosial%20Kabupaten%20Melawi%20Provinsi%20Kalimantan%20Barat.pdf)

Mulianingsih, S. (2019). Meningkatkan Ketahanan Organisasi dengan Menerapkan Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik dan Kelincahan Organisasi di Lingkungan Dinamis. *Media Bina Ilmiah*, 13(12), 1913-1920. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/531/1/886-2403-1-PB.pdf>

Nandini, R., Putri, B. G. R., Setiawan, S. N., Anggraeni, F., & Fedryansyah, M. (2022). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 74. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.38294>

Purwanti, P. (2022). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Magelang Selatan. *JSCCE: Journal of Society and Continuing Education*, 3(2), 383–390. <http://dx.doi.org/10.21831/jsce.v3i2.19426>

Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461-1471 <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492>

Rifa'i, M., Madjid, U., & Ismunarta, I. (2016). Implementasi kebijakan tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di puskesmas garawangi kabupaten kuningan provinsi jawa barat. *Jurnal Dharma Praja*, 9(1), 25-43. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/542>

Sompie, M. E. P. (2022). Analisis Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Sungai Serut. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 1(3), 93–102. <https://doi.org/10.37676/mude.v1i3.2210>

Takaredas, W. P., Niode, B., & Waworundeng, W. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Wori Minahasa Utara. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 1(1), 10–20. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/psp/article/view/36084>

Tampubolon, J. (2023). The Significance of Family Hope Program (PKH) in Improving the Poor's Welfare as an Indicator of Community Empowerment. *Przestrzeń Społeczna (Social Space)*, 23(01), 621–648. <https://socialspacejournal.eu/menu-script/index.php/ssj/article/view/252%0Ahttps://socialspacejournal.eu/menu-script/index.php/ssj/article/download/252/122>

Tolana, S., Hidayat, M., Ahaliki, B., & Olii, S. (2024). Sistem Informasi Pemetaan Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode K-Means Clustering Di Kabupaten Bone Bolango. *Diffusion*, 4(2), 171–180. <https://doi.org/10.37031/diffusion.v4i2.26361>

### **Jurnal Internasional**

- Adato, M., & Hoddinott, J. (2007). Conditional Cash Transfers in Latin America: An Overview of the Evidence. International Food Policy Research Institute (IFPRI) Discussion Paper 00705. <https://www.ifpri.org/publication/conditional-cash-transfers-latin-america-overview-evidence>
- Anggraini, N. W., Khairiyah, A., & Hasanah, F. (2024). Program Keluarga Harapan (PKH): Examining the Social Relation Approach on Poverty Alleviation Policies in Indonesia. Atlantis Press SARL. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-228-6\\_22](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-228-6_22)
- Gertler, P., Martinez, S., & Rubio-Codina, M. (2012). The Impact of Progresa on Health and Education: An Overview of the Evidence. *Journal of Development Economics*, 99(1), 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2012.05.001>
- Hudang, A. K., Hariyanto, T., & Handoyo, R. D. (2024). Does Conditional Cash Transfer Deliver? The Indonesian Evidence On PKH. *Journals Vilniustech Tech*, 25(2), 447–457. <https://doi.org/https://doi.org/10.3846/btp.2024.13865>
- Marantek, H., & Sejati, H. (2023). The Effectiveness of the Family Hope Program (PKH) Social Assistance in Increasing the Welfare of Poor Communities. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 2, 2600–2609. <http://dx.doi.org/10.59141/jrssem.v2i11.476>

